



OPTIMALISASI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Bernadus Ari Yudi Ari Wibowo¹⁾, Firdaus²⁾, Dicky Dharwaly³⁾

^{1,2,3)}Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

Abstrak

Corona Virus Disease (Covid-19) telah menjadi pandemi dunia yang telah tersebar ke seluruh penjuru negara, salah satunya di Indonesia. Namun, pada awalnya publikasi dan respon pemerintah dalam menyikapi wabah Covid-19 masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk analisis dan evaluasi terhadap kepemimpinan demokratis dalam rangka untuk percepatan penanganan Covid-19 saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kualitatif melalui studi pustaka dan Forum Discussion Group. Penelitian ini mengevaluasi terhadap beberapa faktor signifikan yang mempengaruhi kepemimpinan demokratis dalam penanganan Covid-19 sehingga dapat dirumuskan kebijakan, strategi, dan upaya realisasi strategi yang bisa diterapkan dalam rangka optimalisasi kepemimpinan demokratis sebagai masukan kepada pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Kepemimpinan Demokratis, Percepatan Penangan Covid-19

PENDAHULUAN

Kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Tangguh (Yosua, 2001). Konteks dari definisi tersebut akan terus berkembang seiring perkembangan dan dinamika perkembangan tantangan yang ada. Sehingga, improvisasi dalam upaya menghadapi segala ancaman harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh.

Salah satu implikasi dalam upaya mewujudkan Indonesia tangguh saat ini adalah optimalisasi dalam menghadapi pandemi (*Corona Virus Disease*) Covid-19 yang telah menyebabkan kompleksitas masalah di segala bidang. Salah satu solusi relevansi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 adalah dengan pendekatan pada orientasi kepemimpinan yang demokratis.

Selama pandemi Covid-19 terjadi, setiap kepala daerah melakukan respon yang berbeda dalam upaya penanganan Covid-19. Hal ini bisa menjadi tolak ukur seberapa jauh kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah (Ahmad 2020). Dampak Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan diakibatkan oleh kepemimpinan yang kurang cepat dalam mengambil keputusan sehingga mengakibatkan krisis yang berkelanjutan, kurang mampu mengintegrasikan lembaga atau kelompok terkait sehingga pendelegasian wewenang cenderung tumpang tindih dan memperpanjang jalur birokrasi.

Fukuyama (2020) menyebutkan bahwa serta kepemimpinan yang buruk membuat masyarakat dan ekonomi

negara sangat rentan terhadap krisis. Di sinilah peran strategis seorang pemimpin dibutuhkan dalam situasi krisis dengan menjalankan manajemen krisis (ahmad 2020).

Menurut Thoha (2013), gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Rivai (2014) menyatakan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin

Gaya kepemimpinan demokratis dalam penelitian ini diukur melalui keputusan dibuat bersama, menghargai potensi setiap bawahannya, mendengar kritik, saran dan pendapat dari bawahan, serta melakukan kerjasama dengan bawahannya (Pasalong, 2013). Secara umum, pemimpin demokratis adalah pemimpin yang bisa mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional diamanatkan dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sehingga sosok kepemimpinan yang demokratis diharapkan dapat mempercepat penanganan covid-19. Gaya kepemimpinan demokratis banyak dinilai merupakan gaya kepemimpinan yang paling ampuh untuk membawa kesuksesan (Kurniawan 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deduktif dengan analisa secara kualitatif. Sehingga analisa yang dilakukan melalui penjabaran secara deskriptif tanpa ada perhitungan matematis. Informasi Sebagai bahan acuan dalam memperkaya sisi ilmiah dan obyektivitas, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka pada berbagai literatur komprehensif dari buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan Undang Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semenjak awal masuknya pandemi Covid-19, banyak terjadi goncangan yang menyebabkan ketidakstabilan nasional. Awalnya, pemerintah belum mengumumkan kondisi Covid-19 untuk menjaga kekhawatiran masyarakat. Keterlambatan penyampaian informasi mengenai awal masuknya pandemi ini, menyebabkan upaya tarik-menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal dalam negara kesatuan, pemerintah pusat berperan dalam memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Berdasarkan *Forum Group Discussion*, lambat respon ini bertujuan untuk menghindari kebijakan yang justru tidak populis, karena kurang memahami situasi dan fakta dilapangan.

Namun, pemerintah kemudian melakukan tindakan pencegahan serius melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 Tentang gususan tugas percepatan penanganan Covid-19 pada tanggal 20 Maret 2020 disusul penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) tanggal 16 Mei 2020.

Selain itu, berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* yang dilakukan, kurang cepatnya respon pemerintah disebabkan atas beberapa faktor alasan internal dan eksternal. Tabel 1 menginformasikan bahwa terdapat 5 faktor utama yang negatif signifikan dan sebanyak 7 faktor yang positif signifikan dalam mempengaruhi kepemimpinan demokratis. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa semua faktor berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan demokratis nasional dalam percepatan penanganan Covid-19.

Pemecahan masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai factor yang berpengaruh, diperlukan adanya upaya pemecahan masalah untuk optimalisasi kepemimpinan demokratis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pemecahan masalah merupakan rumusan dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan yang berisi kebijakan, strategi, dan upaya dalam realisasi strategi yang dibuat. Perumusan kebijakan sebagai solusi dalam pemecahan masalah yang terdiri atas pokok persoalan dengan mempertimbangkan faktor peluang dan kendala sesuai dengan indikator keberhasilan secara ringkas disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Analisis pemecahan masalah dalam kepemimpinan demokratis

Strategi

Untuk mengoptimalkan kepemimpinan demokratis nasional dalam percepatan penanganan Covid-19 maka perlu disusun suatu kebijakan sebagai bagian dari pemecahan masalah yang ada. Terdapat 3 Strategi yang relevan dalam upaya peningkatan kepemimpinan demokratis yang diantaranya adalah :

- 1) Dalam rangka memecahkan permasalahan terkait

kepemimpinan demokratis yang kurang cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan, dirumuskan strategi 1 yaitu dengan optimalisasi kepemimpinan nilai-nilai Pancasila dengan cara melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dalam percepatan penanganan Covid-19 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia Tangguh.

- 2) Strategi 2 berorientasi pada permasalahan terkait kepemimpinan demokratis yang tidak bisa mengintegrasikan antar lembaga maka untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan terkait optimalisasi kepemimpinan demokratis dalam menghadapi permasalahan terkait kepemimpinan demokratis yang tidak bisa mengintegrasikan antar lembaga dirumuskan strategi 2 dengan Langkah optimalisasi kepemimpinan demokratis nasional dalam mengintegrasikan lembaga terkait melalui penyusunan regulasi pengintegrasian lembaga dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia Tangguh.

Tabel 1. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan demokratis

Faktor	Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Demokratis			
	Negatif Signifikan	Negatif Tidak signifikan	Positif Tidak Signifikan	Positif Signifikan
Pandemi Covid-19	90%	10%		
Situasi politik	50%	25%	25%	
Sosial media		10%	30%	60%
Keberanian didalam pengambilan keputusan			10%	90%
Memahami situasi dan diplomasi			10%	90%
Kebijaksanaan			20%	80%
Budaya gotong royong		20%	20%	60%
Kebijakan dan penetapan undang-undang kesehatan		20%	30%	50%
Vaksin Covid-19			20%	80%
Resesi Ekonomi	75%	25%		
Fasilitas kesehatan	50%	20%	30%	
Berita hoax	90%	10%		

- 3) Terakhir, strategi 3 di fokuskan untuk memecahkan permasalahan terkait kepemimpinan demokratis yang tidak bisa melaksanakan pendelegasian wewenang serta dengan adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi maka untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan terkait optimalisasi kepemimpinan demokratis dalam menghadapi permasalahan terkait kepemimpinan demokratis yang tidak bisa melaksanakan pendelegasian wewenang dirumuskan strategi 3 melalui optimalisasi kepemimpinan demokratis nasional dalam pendelegasian wewenang melalui edukasi undang undang No. 32 tahun 2004

dalam percepatan penanganan Covid-19.

Upaya dalam Realisasi Strategi

Upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai gambaran strategi untuk masing-masing masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1) Upaya mewujudkan Strategi 1, yaitu dengan optimalisasi kepemimpinan demokratis nasional dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat melalui edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia tangguh yang harus dilakukan adalah salah satunya berdasarkan Hukum Kepemimpinan yang dituangkan oleh Bill Newman dalam bukunya *The Ten Laws of Leadership*, ada sepuluh kriteria atau hukum kepemimpinan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Diantaranya adalah pemimpin harus mempunyai visi, disiplin, kebijaksanaan, keberanian, dll.

Tabel 2. Optimalisasi kepemimpinan

Upaya mewujudkan Strategi 2, yaitu dengan mengacu pada Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat harus aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sudarwan Danim mengemukakan kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh

anggapan bahwa hanya karena interaksi kelompok yang dinamis. Sinergitas sistem kesehatan nasional dalam menghadapi situasi pandemi

Tabel 2. Analisis pemecahan masalah dalam kepemimpinan demokratis

Pokok persoalan	Belum Optimalnya kepemimpinan demokratis nasional dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional guna terwujudnya Indonesia tangguh .
Masalah yang ditemukan	1. Kurang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. 2. Kurang mampu mengintegrasikan antar lembaga/kelompok 3. Kurang pendelegasian wewenang.
Faktor Eksternal	1. covid-19 2. Situasi politik 3. Sosial media
Faktor Internal	1. Keberanian didalam mengambil keputusan 2. Memahami situasi dan diplomasi 3. kebijaksanaan
Peluang	1. Budaya gotong royong. 2. Kebijakan dan penetapan Undang - Undang kesehatan 3. Vaksin Covid-19
Kendala	1. Resesi ekonomi 2. Fasilitas kesehatan 3. Berita hoax
Indikator keberhasilan	1a. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 1b. Lembaga/ kelompok dapat terintegrasi dalam sistem penanganan covid-19. 1c. Wewenang diberikan sesuai dengan fungsi dan tugas dari lembaga terkait. 2a. Pandemi covid-19 dapat ditekan bahkan dihilangkansecepat mungkin. 2b. Ekonomi masyarakat meningkat, pengangguranberkurang dan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi nasional. 3a. Mampu keluar dari krisis pandemi 3b. Kesejahteraan masyarakat meningkat

Covid-19 erat kaitannya dengan sinergitas sistem Kesehatan nasional. Dalam Undang-Undang situasi pandemi covid-19 erat kaitannya dengan sinergitas sistem Kesehatan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menyatakan, kesehatan selain menjadi hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi. Pemimpin demokratis dapat mengintegrasikan antar lembaga atau

kelompok sehingga mampu menyatukan semua data baik tentang pandemi sehingga mudah dilaksanakan penanganan dan mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan. Pemimpin demokratis yang berkarakter jujur, amanah serta mempunyai kecerdasan dan kemampuan komunikasi yang dapat menyampaikan program – program kebijakan pemerintah dengan lebih mudah diterima dan diikuti. Kebijakan dalam menghadapi pandemi dijelaskan secara rasional, evidence-based (praktek yang berdasarkan bukti) yang dijustifikasi dengan kaidah ilmu pengetahuan, serta diinformasikan secara transparan. pemimpin demokratis beralasan rasional di balik keputusan yang diambil. Integrasi antar lembaga atau kelompok akan mempercepat penangan pandemi covid-19 karena memiliki kesamaan data yang dijadikan dasar dalam proses penanganan. Sinergitas sistem dapat menutup celah korupsi dan mengefektifkan program dan kebijakan yang dibuat

2) Upaya mewujudkan Strategi 3, yaitu dilakukan dengan pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Intinya, urusan pemerintah harus dijalankan sesuai aturan yang ada dan bersinergi dalam rangka optimalisasi kebijakan dengan pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Percepatan dalam penanggulangan Covid-19 dapat dilakukan melalui pendekatan optimalisasi kepemimpinan demokratis. Dalam upaya realisasinya, penelitian ini mengajukan 3 strategi dan upaya realisasi sebagai respon dari faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap kepemimpinan demokratis terkait dengan upaya penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Adapun upaya relevan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan Covid-19 adalah dengan edukasi dan sosialisasi dengan cara melibatkan semua bawahan untuk ikut pengambilan keputusan dalam percepatan penanganan Covid-19 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia Tangguh. Kedua, masyarakat harus turut ikut aktif dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu dengan mengacu pada Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum. Terakhir, optimalisasi upaya pelaksanaan pemerintahan pusat dan daerah sesuai dengan aturan yang telah tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) untuk sinergi dalam kebijakan dan memaksimalkan wewenang sesuai dengan aturan yang ada.

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M.I. 2020. Manajemen Krisis: Kepemimpinan Dalam Menghadapi Situasi Krisis Covid-19. Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan. Volume 1 (2).

Francis Fukuyama, "The Pandemic and Political Order: It Takes a State," Juli/Agustus 2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order>, diakses pada 7 Juni 2021

Kurniawan Y.F. 2018. Pengaruh Gaya kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Karyawan di CV Anugrah jaya. Agora Vol 6 no.2

Rivai, V. (2004). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Thoha, M. (2013). Kepemimpinan dalam manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Pasolong, H. (2013). Kepemimpinan birokrasi. Bandung: Alfabeta.